

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Program Keluarga Harapan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam

Muhammad Afif Syaifur Rohman^{1*}, Faizal², Tantowi Jauhari³

¹ Pendamping Sosial Kabupaten Pringsewu, Lampung, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

*Email korespondensi: afif.muhammadsr@gmail.com

Abstract

The Indonesian government has implemented the Family Hope Program since 2007, in an effort to accelerate poverty reduction. PKH companions are one of the determinants of achieving success in programs that are carried out intensively and sustainably. Facilitators are not fully able to resolve problems that exist between KPM PKH or between companions and KPM PKH. The aim of this research is to find out how the implementation of assistance to KPM PKH improves the social welfare of the Adiluwih Village community and what are the supporting and inhibiting factors for the effectiveness of implementing assistance to KPM PKH in Adiluwih Village. This research is field research using qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research explain that the assistants in implementing PKH in Adiluwih Village have been effective. The research results show that PKH facilitators have effectively implemented empowerment programs for PKH KPMs in the form of; Program to develop interest in learning through Tutoring, Limited Land Utilization Program, and Family Capacity Building Meeting Program (P2K2). As for the supporting factors for the effectiveness of the implementation of mentoring, namely that the companion has good skills in communicating with the community and recipients of PKH assistance because the companion has attended Social Worker education and training and the companion has been certified as a Professional Social Worker, making it easier for the companion to provide understanding and solve problems. problems faced by the community during the process of implementing the Family Hope Program assistance. Meanwhile, the factor inhibiting the effectiveness of the implementation of mentoring is that PKH facilitators find it difficult to allocate their time to each implementation of empowerment program monitoring activities because the assisted area is too large and there are still KPMs who are not present during the socialization of the program being implemented.

Keywords: Social Assistance, Family Hope Program, Community Empowerment

Saran sitasi: Rohman, M. A., Faizal., & Jauhari, T. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Program Keluarga Harapan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2066-2079. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.14292>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.14292>

1. PENDAHULUAN

Penanganan kemiskinan yang ada diperlukan suatu program yang dapat memberdayakan masyarakat miskin. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa

negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat Di Kabupaten Pringsewu memulai PKH yang dimulai pada tahun 2012. Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian uang tunai kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya (Rahayu, S. L, 2015). PKH difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat

miskin melalui pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai target peserta

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat PKH adalah (1) dalam jangka pendek yaitu memberikan *income effect* melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin; (2) dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RTM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) dan memberikan kepastian akan masa depannya (*insurance effect*); (3) merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan, dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dan lain-lain) dan *opportunity cost* (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada sekolah); (4) mengurangi pekerja anak, yaitu mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah RTM menjadi tuna sosial dan/ penyandang masalah kesejahteraan social; (5) peningkatan kualitas pelayanan publik melalui *complementary* perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan (*supply side*), pengembangan sistem perlindungan sosial masyarakat miskin (demand side), sekaligus penguatan desentralisasi, dan (6) percepatan pencapaian SDGs melalui indikator kemiskinan, pendidikan, ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender (Achmadi, Abu dkk, 2003).

Tabel 1

Indeks Besaran Dana yang Diterima Peserta Penerima Program Keluarga Harapan

No	Komponen Bantuan	Indeks bantuan / Tahun (Rp)
1	Bantuan ibu hamil dan menyusui	3.000.000
2	Bantuan anak usia di bawah enam (6) tahun	3.000.000
3	Bantuan peserta Pendidikan setara SD/MI atau sederajat	9.000.000
4	Bantuan peserta Pendidikan setara SMP/MTs atau sederaja	1.500.000
5	Bantuan peserta Pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	2.000.000

No	Komponen Bantuan	Indeks bantuan / Tahun (Rp)
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas	2.400.000
8	Bantuan Penderita Penyakit TBC	3.000.000

Sumber: Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2023

Terdapat beberapa kewajiban peserta PKH yaitu diantaranya ibu hamil/nifas adalah pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali dalam 3 kali trisemester, melahirkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan. Bayi dan Balita yaitu usia 0-11 bulan imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan, usia 6-11 bulan mendapat suplemen vitamin A, usia 1-5 tahun imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan setiap bulan, usia 5-6 tahun pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun, usia 6-7 tahun timbang badan di fasilitas kesehatan (Damanik, J, *Pekerjaan social*,2015)

Anak sekolah usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP, SMA), terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan, minimal 85% kehadiran dikelas. Penyandang disabilitas berat yaitu pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan, pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*). Lansia miskin di atas 70 tahun yaitu pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia), dan mengikuti kegiatan sosial (*day care dan home care*).

Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Peran pendamping PKH berdasarkan konsep peran *community worker* adalah sebagai peran dan keterampilan fasilitatif. Peran yang berkaitan dengan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini adalah menjadi model, melakukan negosiasi dan mediasi, memberikan dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan

pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Di sisi lain, ada juga sebagai peran dalam keterampilan mendidik (Agus Ahmad Safei, Nanih Machendrawati, 2003)

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. Peran lain yaitu dalam keterampilan representasi/perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi nama kepentingan masyarakat dampungannya (Departemen Sosial, *Bimbingan teknis PKH, 2017*) Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Sebagai peran akhir yaitu dalam keterampilan teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melakukan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti melakukan riset, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

Beberapa Penelitian yang berkaitan dengan peran pendamping social dalam pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan, pertama, Evi Rahmawati dkk (2017), Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran pendamping, faktor penghambat dan pendukung dalam pendampingan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendamping sebagai subjek penelitiannya. Wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, metode dan teori. Analisis datanya menggunakan siklus interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping memiliki empat peran keterampilan yaitu peran fasilitatif, pendidik, representatif/perwakilan masyarakat, dan teknis. Faktor internal yang menjadi kendala adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data, dan beradaptasi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu lama. Faktor

eksternal yang menjadi kendala adalah penginformasian dari pusat sifatnya mendadak, jarak tempuh pendamping ke tempat pendampingan cukup jauh dan lokasi tempat pendampingan yang berada di gang sempit. Faktor pendukung adalah antusiasme penerima bantuan serta sarana yang memadai.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Rauf A. Hatu (2018) Sejalan dengan semangat paradigma pembangunan di era otonomi yang mengakui kesetaraan proporsi sektor masyarakat dengan sektor negara dan swasta sebagai stakeholders pembangunan, maka aksi-aksi pemberdayaan masyarakat menjadi signifikan dilakukan. Hal ini disadari keyakinan jika masyarakat menunjukkan tingkat emansipasi yang tinggi dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada lingkup regional maupun global. Dari sini upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari upaya suatu bangsa dalam rangka memperbaiki tingkat inisiasi, peran serta atau partisipasi dan emansipasi para warganya dalam program pembangunan.

Ketiga Penelitian yang dilakukan Siti Nurhasanah dkk (2019), Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis akan pelatihan pendamping sosial dalam meningkatkan kemampuan Fasilitasi Program kelompok usaha bersama. Pelatihan pendamping sosial PKH ini diselenggarakan di BBPPKS Regional II Bandung. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang: 1) Proses pembelajaran pembelajaran pelatihan pendamping social PKH, 2) peningkatan kemampuan fasilitasi pendamping sosial PKH dan 3) faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelatihan pendamping sosial PKH di BBPPKS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian pengelola, widyaiswara, lulusan pelatihan pendamping sosial PKH. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi data di BBPPKS Regional II Bandung. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Proses pembelajaran pelatihan pendamping sosial PKH dianalisis dari prosedur, pendekatan, metode, teknik dan media pembelajaran. Proses pembelajaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan (2) peningkatan kemampuan

fasilitasi pendamping sosial kelompok usaha bersama dianalisis dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Terdapat peningkatan yang di rasakan oleh pendamping PKH yang telah mengikuti pelatihan pendamping sosial PKH di BBPPKS (3) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan pendamping sosial PKH. Faktor pendukung diantaranya perencanaan, anggaran, Program pemerintah, sarana prasarana, penggunaan media dan metode bervariasi, kompetensi widyaiswara, menciptakan relasi berbagai pihak, mampu mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antar pendamping PKH dalam memecahkan permasalahan program PKH yang ada. Sedangkan Faktor penghambat pelatihan ini adalah cuaca dingin, kemampuan narasumber atau widyaiswara tidak sama, kemampuan peserta berbedabeda dan jumlah peserta tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Riska Nandini dkk (2019), penelitian ini dilator belakangi bahwa Harapan (PKH), yaitu program tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer*), di mana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan tunai sepanjang memenuhi kewajibannya. Program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Jumlah penduduk Desa Genteng tercatat sekitar 6.500 jiwa dan mata pencarian warga didominasi oleh petani dan buruh tani. Secara garis besar tingkat perekonomian masyarakat di Desa Genteng masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi, Salah satu upaya pemecahan masalah tersebut melalui Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan program PKH, terdapat permasalahan konflik sosial yakni ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Peran pendamping PKH merupakan aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan tugas umum, serta menyelesaikan konflik sosial terkait bantuan sosial melalui proses mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran (Riska Nandini dkk,2019)

Kelima penelitian yang dilakukan Haris Munandar dkk (2019), Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menggambarkan Peranan Tenaga Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. Seperti yang dikemukakan didalam fokus penelitian yaitu sosialisasi PKH, pertemuan awal dan validasi data, pemutakhiran data, Memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan Melakukan pendampingan KPM PKH. Dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Peranan Tenaga Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. Berdasarkan hasil penelitian Peranan Tenaga Pendamping Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara dalam hal melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat Kecamatan. Kelurahan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan dan masyarakat umum selama ini sudah dilaksanakan hanya saja belum optimal, tenaga pendamping selama ini sudah melakukan pertemuan awal dan validasi data dengan dibantu oleh aparat Kelurahan dan Ketua RT, pemutakhiran data dilakukan jika ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dari latar belakang di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tema di atas.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan (*pendamping, penyuluhan, dan pelayanan*). Secara konseptual pemberdayaan (*empowement*) berasal dari kata *power* yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Paradigma pemberdayaan masyarakat adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah (Rosmedi Dan Riza Risyanti, 2006).

Kesejahteraan

Grand theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham

menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk (Oman Sukmana, 2016).

Kesejahteraan Sosial

Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kesejahteraan sosial sebagai *a condition or state of human well-being*. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya (James Midgley, 2014).

Efektivitas

Menurut Emerson dalam Handayaniingrat, efektivitas adalah “pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut Pasolong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “Efek” dan digunakan dalam istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karna adanya proses kegiatan (Kartika Febri Yuliani, 2017)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di kantor program keluarga harapan (PKH) Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada Januari – April Tahun 2023. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini terdiri 10 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, Pekerja Sosial Masyarakat Desa, Pendamping PKH dan Keluarga Penerima manfaat Program PKH. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi (Helaluddin, dkk2019). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan jenis deduktif yaitu proses secara sistematis mencari dan mengolah

berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian yang bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum kemudian menyebarkan hal khusus. (Hamidi, 2004)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan PKH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Efektivitas secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu kesesuaian antar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dalam hal ini menunjukkan telah seberapa jauh tujuan yang tercapai, yang mana tujuan tersebut telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana kemampuan kinerja seseorang maupun organisasi dalam melakukan pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Tingkatan efektivitas dapat diukur juga dengan cara membandingkan antara sebuah rencana yang telah ditentukan dengan sebuah hasil nyata yang telah diwujudkan, dengan usaha-usaha maupun hasil dari tindakan dan pekerjaan yang dilakukan haruslah tepat dan sesuai. Jika, usaha atau tindakan yang dilakukan tidak tepat, maka akan menyebabkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tidak tercapai atau dapat dikatakan tujuan dari program tersebut tidak berjalan dengan efektif/tidak efektif.

Pencapaian efektivitas pada Program Keluarga Harapan dapat dilihat dengan bagaimana upaya dalam pemberdayaan masyarakat dengan menjalin adanya hubungan kerjasama dengan aparatur pemerintah dan juga masyarakatnya, baik itu dalam keadaan individu ataupun sebagai kesatuan dalam berkelompok.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah sebuah prinsip yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dari sebelumnya. Dengan demikian, pencapaian keberhasilan suatu program tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan keberhasilan program juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kunci utamanya adalah adanya hubungan kerjasama yang baik. Pada proses ini fungsi dari pendamping pada Program Keluarga Harapan merupakan suatu penghubung yang berperan untuk menjembatani antar aspirasi-aspirasi masyarakat dengan pemerintah

maupun juga sebaliknya. Dengan tujuan Program Keluarga Harapan adalah program yang ditujukan untuk mengubah kehidupan masyarakat yang kurang mampu agar dapat hidup layak maupun sejahtera hingga masa yang akan datang. Efektivitas dalam pencapaiannya, ditentukan oleh beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses pencapaian tujuan pada suatu program. Adapun indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

3.1.1. Pemahaman Program

Program Keluarga Harapan adalah suatu program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat yang dikategorikan sebagai keluarga yang kurang mampu dengan tujuan pencapaian program percepatan penanggulangan kemiskinan serta pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Pemahaman program dapat dilihat dengan cara seberapa jauh pemahaman dari kelompok sasaran dalam memahami program maupun terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pencapaian efektivitas pada program maupun kegiatan-kegiatan akan dapat dikatakan, jika pendamping PKH dan kelompok sasaran dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat dapat memahami program maupun kegiatan-kegiatan tersebut.

Pendamping PKH harus memiliki pemahaman tentang bagaimana menjalankan Program Keluarga Harapan dengan baik, serta memahami bagaimana tujuan dari tugas pendamping terhadap pemberian pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Adiluwih. Pendamping PKH memiliki tugas maupun peran adalah mendampingi keluarga-keluarga yang termasuk ke dalam Keluarga Penerima Manfaat. Dampingan tersebut dapat berupa mendampingi bantuan kepada anak-anak sekolah SD/SMP/SMA, mendampingi bantuan kepada ibu hamil dan bayi/balita, serta mendampingi segala pengaduan ataupun masalah yang dialami masyarakat selama proses pelaksanaan kewajibannya menjadi peserta penerima PKH.

Menurut pendamping PKH di Desa Adiluwih, Toto Budiarto menjelaskan. *“Pendamping selalu memberikan pemahaman tentang bagaimana proses pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan tersebut, mulai dari pemahaman tentang hak dan juga kewajiban yang harus di penuhi oleh KPM, sampai*

kepada bagaimana proses pencairan dana bantuan yang diberikan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping PKH telah menjalankan tugasnya sebagai pendamping PKH dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana hak serta kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penerima PKH, tidak pula pendamping selalu menghimbau Keluarga Penerima Manfaat PKH yang berjumlah 108 Kepala Keluarga yang ada di Desa Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.

Hal ini juga, dijelaskan oleh Ibu Siti Halimah sebagai salah satu Keluarga Penerima Manfaat PKH *“Setiap pertemuan yang diadakan oleh pendamping PKH Bapak Toto Budiarto, tidak pernah lupa untuk menyampaikan hak dan kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh KPM, seperti memastikan anak-anak Desa Adiluwih tidak putus sekolah (pendidikan terjamin), memeriksakan kesehatan baik untuk ibu hamil atau bayi/balita ke posyandu selama 1 bulan sekali. Dan hasil dari setiap musyawarah yang disampaikan bahwa bagi ibu-ibu/keluarga penerima PKH yang kalau sudah memiliki mobil, kebun, atau yang dianggap sudah mampu, maka pendamping berhak untuk mengeluarkan ibu/keluarga tersebut sebagai penerima PKH”.*

Hal ini juga di pertegas oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH lainnya, yaitu ibu Hasanah. *“Pendidikan, posyandu, kesehatan untuk ibu hamil selalu ditegaskan oleh pendamping PKH untuk selalu dijalankan, karena itu merupakan hak dan kewajiban sebagai penerima PKH di Desa Adiluwih. Apabila kewajiban diatas tidak dilaksanakan secara rutin, maka pendamping akan memberikan sanksi atau teguran pertama, dan kemudian jika sama sekali tidak dijalankan, maka hak sebagai anggota penerima PKH akan di cabut atau dikeluarkan”.*

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Romiyatun, selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Adiluwih *“Pendamping PKH Desa Adiluwih selalu menyampaikan informasi mengenai apa saja hak dan juga kewajiban kami selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH, serta selalu memberitahukan informasi-informasi penting mengenai segala sesuatu yang kami butuhkan selama menjadi penerima bantuan PKH”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping menyampaikan hak dan juga kewajiban semata-mata untuk menjalankan tugasnya, yang telah diperoleh dan dipercayakan kepada pendamping PKH. Namun, juga ada sebagian kecil yang masih menjadi

kendala pendamping untuk melakukan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat penerima PKH. Pada kegiatan pendampingan, yang dimana pendamping memberikan pemahaman program kepada KPM, masih ditemukan penerima yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana semestinya untuk memenuhi hak dan juga kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH. Hal ini dapat dilihat dari proses wawancara yang dilakukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH yang hanya memahami bagaimana proses pencairan dana bantuan, tanpa tahu bagaimana hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penerima bantuan PKH. Seperti ibu Yuni menjelaskan “ketika kegiatan pendampingan, saya terkadang tidak bisa hadir di karenakan ada kesibukan bekerja, kadang sakit sehingga saya kurang memahami hak dan kewajiban sebagai penerima PKH. Sehingga sampai sekarang saya kurang memahami bagaimana pelaksanaan PKH tersebut. Apalagi disaat pandemi sekarang, hampir tidak ada pertemuan yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan alasan tidak diperbolehkan adanya kerumunan atau perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Sehingga, banyak hal-hal yang menjadi semakin bingung”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika dilihat sebelum adanya pandemi melanda dunia dan terutama Indonesia, pendamping selalu bebas untuk melakukan kegiatan setiap bulannya. Namun, selama adanya Corona yang membuat aktivitas masyarakat tidak bisa seperti biasanya, baik itu dalam hal bekerja, mengadakan proses belajar mengajar, mengadakan rapat musyawarah, dan segala hal yang melibatkan banyak orang, termasuk kegiatan PKH yang diadakan setiap bulannya tidak pernah lagi diadakan selama pandemi ini berlangsung.

3.1.2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran ditentukan oleh sejauh mana pemilihan peserta program itu tepat maupun sesuai dengan sasaran dari program yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan suatu program akan sangat ditentukan dengan bagaimana penentuan sasaran yang tepat dan sesuai. Namun sebaliknya, keberhasilan suatu program akan terhambat jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat. Program Keluarga Harapan pada umumnya memiliki tujuan utama yaitu untuk mengurangi kemiskinan terhadap masyarakat, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pelaksanaan PKH di Desa Adiluwih telah

sesuai dengan tujuan dari PKH, yaitu membantu untuk keperluan pengeluaran biaya ekonomi masyarakat yang tergolong sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. serta dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Adiluwih.

Ketepatan sasaran dalam menentukan pilihan dapat dilihat dari bagaimana penentuan pemilihan masyarakat yang tergolong tidak mampu atau yang memiliki kategori yang sesuai dengan syarat penerima bantuan PKH. Oleh karena itu, seorang pendamping PKH haruslah yang orang yang berkualitas serta bisa menjalankan sepenuhnya tugas yang diberikan kepadanya, dikarenakan pendamping PKH yang nantinya akan selalu berhubungan dengan masyarakat penerima bantuan PKH selama proses Program Keluarga Harapan dilaksanakan.

Menurut pendamping PKH, penerima bantuan di Desa Adiluwih sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria berdasarkan komponen yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Hal ini di sampaikan oleh Toto Budiarto selaku pendamping di Desa Adiluwih. “Selama saya menjadi pendamping di Desa Adiluwih, masyarakat yang menerima bantuan termasuk ke dalam kategori keluarga kurang mampu, seperti memiliki anak-anak yang masih sekolah mulai dari SD/SMP/SMA, memiliki bayi/balita serta ibu hamil. Dan masih banyak masyarakat yang menggantungkan sebagian hidupnya dengan biaya dari PKH, karena mengingat masyarakat Desa Adiluwih peluang usahanya masih hampir rentan tidak ada dan hampir rata-rata pekerjaan masyarakatnya sebaga Petani”.

Sebagaimana hasil wawancara diatas, keluarga yang kurang mampu syarat utama sebagai penerima bantuan PKH dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa merubah hidupnya ke yang lebih baik dan mampu melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi serta diharapkan tidak anak yang putus sekolah di Desa Adiluwih, dan ini sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Hal ini juga dipertegas kembali oleh Kepala Desa Adiluwih Bapak Dedi Sutrisno, yang menyatakan penerima PKH Sudah Tepat sasaran. “Sangat Jarang ditemukan di dalam kelompok kegiatan yang dapat dikategorikan mampu atau sejahtera. Hal ini disebabkan karena, pendamping PKH selalu mendata atau melakukan verifikasi langsung ke lapangan terkait keluarga mana saja yang dikategorikan miskin. Pendamping hanya

menerima data dari Desa, yang kemudian ditetapkan oleh DTKS dan dijadikan pedoman oleh pendamping dalam melakukan tugasnya untuk memberikan dampingan terhadap penerima bantuan PKH. Pendamping dan Desa tidak memiliki hak untuk menetapkan keluarga mana yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut”.

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris, yaitu Bapak Imam Hanafi. “Ketika ada masyarakat yang tidak menerima PKH, biasanya selalu melaporkan ke Desa, dan memintak untuk di masukkan sebagai penerima PKH. Namun, masyarakat tidak mengerti bahwa dari pihak Desa tidak ada sangkut pautnya dalam penentuan penerima bantuan PKH kami hanya sebatas mengusulkan”

Hal tersebut juga dipertegas oleh Ketua Pekerja Sosial (PSM) Desa Adiluwih, yaitu Bapak Eli Yulianto “Pendamping PKH Selau menjalin hubungan dengan PSM selaku lembaga masyarakat yang lebih mengetahui kehidupan masyarakat di Desa Adiluwih. Jadi, antara pendamping PKH dengan PSM didesa memiliki Hubungan yang erat sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan PKH di Desa Adiluwih”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pendamping PKH tidak ada berhubungan secara langsung dengan Kepala Desa, sekretaris maupun Pekerja Sosial (PSM) yang ada didesa selaku perwakilan masyarakat melainkan Mitra Kerja dalam pelaksanaan Program PKH. Pendamping harus tetap melakukan hubungan dengan para wakil masyarakat di Desa tersebut, ditujukan agar lebih mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan masyarakat Desa sesungguhnya. Sehingga, pendamping bisa membedakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dengan katogeri miskin dengan masyarakat yang masih bisa digolongkan ke dalam kondisi mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka, PKH sebagai program bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin dapat berjalan sesuai dan tepat sasaran dalam penerimaannya.

3.1.3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dapat dilihat dengan cara bagaimana penggunaan waktu yang digunakan selama proses pelaksanaan program tersebut, apakah dalam proses pelaksanaan program telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan sebelumnya ataupun sebaliknya yaitu tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan guna dalam pencapaian tujuan dari

program. Penggunaan waktu yang tepat juga akan menentukan seberapa efektif program yang telah dilaksanakan.

Segala sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan setiap kegiatan yang dilakukan dalam sebuah program adalah bagaimana untuk bisa mengatur ketetapan waktu yang digunakan. Dalam hal ini pada Program Keluarga Harapan ketetapan waktu dapat dilihat bagaimana keberhasilan pendamping dalam mengadakan kegiatan sosialisasi setiap satu bulan sekali, yang mana kegiatan ini diperuntukkan sebagai peningkatan kemampuan pada setiap keluarga yang tergolong tidak mampu serta terdaftar sebagai Kelurga Penerima Manfaat dari PKH.

Pengadaan kegiatan sosialisasi yang diadakan setiap satu bulan sekali ditujukan untuk memberikan edukasi dan juga pengetahuan atau ilmu tentang bagaimana cara-cara untuk mendidik anak-anak sekolah dengan baik serta pendamping selalu menghibau para keluarga atau ibu-ibu untuk selalu memeriksakan kesehatan anak serta kandungannya ke posyandu yang telah disediakan disetiap bulannya.

Pendampingan yang dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi para penerima bantuan PKH dalam menjalankan segala kewajibannya, seperti memeriksakan kesehatan baik itu bagi ibu hamil dan juga balita di pusat kesehatan posyandu, menjalankan pendidikan bagi anak-anak sekolah mulai dari SD/SMP/SMA, serta mengikuti kegiatan pertemuan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Dalam hal ini ketepatan waktu sangat mentukan kelancaran penerima bantuan program keluarga harapan atau PKH, dengan ketepatan waktu juga memberikan kelebihan tersendiri bagi masyarakat bahkan terhadap pendamping sendiri.

Pada pertemuan yang diadakan satu bulan sekali, di dalamnya pendamping mensosialisasikan bagaimana strategi dalam pertemuan awal. Sebelum dilaksanakannya pertemuan awal, pendamping akan membagikan undangan dari Kementerian Sosial RI berupa SUPA (surat undangan pertemuan awal), yang diberikan kepada masyarakat terdata dalam kategori miskin Pendamping juga akan membantu masyarakat selaku KPM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi selama proses pelaksanaan PKH berlangsung. Pada penyelesain setiap masalah, pendamping akan turun langsung dan memberikan solusi kepada KPM, seperti pendampingan kepada para peserta ibu-ibu yang masih tidak mengerti cara

untuk pengambilan dana bantuan, turun langsung untuk melihat kewajiban-kewajiban KPM apakah sudah dijalankan atau tidak, jika masih terdapat KPM yang tidak menjalankan sepenuhnya kewajibannya, maka pendamping akan memberikan peringatan sebanyak tiga kali kepada KPM untuk menjalankan kewajibannya tersebut. Jika, hal tersebut masih tidak dijalankan, maka peserta KPM akan dikeluarkan sebagai penerima bantuan PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH Desa Adiluwih, yaitu Toto Budiarto, mengatakan “Pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan itu setiap 1 bulan sekali, kegiatan pertemuan rutin dilakukan dalam rangka mengubah pola pikir Penerima PKH dalam membunuh mindset kemiskinan itu sendiri, karena menurut saya kondisi Miskin adalah mindset yang harus di ubah paling awal, kecuali pada masa pandemi Covid tidak dilakukan sama sekali, mengingat himbuan pemerintah yang tidak mengizinkan mengadakan kegiatan- kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak. Hal ini, menyebabkan pendamping hanya melakukan komunikasi dengan ketua kelompok KPM melalui media yaitu berupa handphone, kemudian ketua kelompok menyampaikan kepada anggotanya terkait informasi yang di sampaikan pendamping. Informasi yang di sampaikan oleh pendamping tidak dilakukan setiap minggu atau bulannya, pendamping hanya akan melakukan komunikasi dengan ketua kelompok jika bantuan tersebut akan dikeluarkan”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat PKH, yaitu Ibu Siti Halimah “Sebelum Corona kegiatan dilakukan setiap satubulan sekali dengan sebagaimana PKH lainnya yang dilakukan dalam setiap desa. Namun setelah adanya Corona kegiatan pertemuan tidak pernah diadakan lagi tetapi ketua kelompok KPM tetap berkomunikasi dengan pendamping, kemudian hasil komunikasi tersebut disampaikan melalui grup whatsapp para penerima bantuan PKH agar bisa dipahami apabila pencairan dana sudah cair maka ketua PKH harus menginfokan kepada seluruh penerima bantuan melalui HP/Handpone di Desa Adiluwih ini”.

Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Siti Marfuah, selaku penerima PKH di Desa Adiluwih menyatakan “Meskipun Corona para penerima bantuan PKH tetap mendapatkan informasi dari ketua kelompok KPM. Kemudian jika terdapat masalah antara penerima

bantuan maka disampaikan melalui ketua dan kemudian ketua menyampaikan kepada pendamping PKH karena dengan adanya laporan tersebut maka pendamping PKH bisa dengan efektif dan tepat dalam setiap melaksanakan kegiatan dan tepat pada waktunya.”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rosmaini, selaku penerima bantuan PKH menyatakan: “Corona atau tidak Corona pendamping PKH wajib memberikan arahan meski hanya melalui ketua kelompok KPM, karena setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima dana bantuan pada setiap tahunnya akan berbeda-beda.”

Sebagaimana hasil wawancara diatas, pertemuan yang diadakan setiap bulannya dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat selaku peserta penerima bantuan PKH untuk menjalankan kewajibannya yang harus dipenuhi, membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPM, memberikan arahan kemana seharusnya dana bantuan tersebut digunakan, serta membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, pada pelaksanaannya pertemuan hanya akan diadakan jika dana bantuan akan dikeluarkan, dan dirasa jika ada hal-hal penting menyangkut Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dalam hal ini kekurangan atau kelebihan dari setiap kegiatan atau dari segi penerima bantuan program keluarga harapan harus menentukan dan menciptakan ketepatan waktu karena itu menjadi keefektifan dalam suatu masyarakat di Desa Adiluwih.

3.1.4. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan ditentukan dengan bagaimana tercapai atau tidaknya sebuah program yang telah dibentuk sebelumnya. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan juga bantuan sosial kepada KPM dalam rangka untuk mengurangi beban setiap keluarga atau bahkan untuk memutus rantai kemiskinan, sehingga masyarakat hidup sejahtera. Pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan juga sangat di dukung dengan kinerja dari pendamping. Pendamping PKH bertujuan untuk mendampingi KPM dalam segala proses kegiatan/pelaksanaan PKH, seperti mengadakan kegiatan setiap bulannya untuk memberikan arahan serta berdiskusi dengan kelompok KPM PKH, meningkatkan kapasitas diri dari para KPM, mendampingi setiap proses pembayaran, berkunjung

ke rumah KPM, serta mengontrol dan memastikan KPM PKH melaksanakan kewajibannya baik itu memeriksakan diri ke posyandu bagi ibu hamil dan bayi/balita, serta memastikan anak-anak tetap sekolah.

Dalam hal ini pencapaian tujuan juga menjadi salah satu keefektifan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang menerima PKH, pencapaian tujuan akan melahirkan harapan-harapan yang menjadi pokok utama pendamping yaitu meningkatnya masyarakat yang sejahtera, anak-anak yang berpendidikan dan ekonomi yang stabil. Dalam pendidikan anak nantinya bisa menggunakan dana PKH untuk membeli perlengkapan sekolah supaya lebih menjadikan anak-anak tersebut rajin dalam proses belajarnya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, pendamping memiliki tugas untuk pencapaian tujuan dalam proses pelaksanaan PKH tersebut, diantaranya adalah : Memfasilitasi peserta PKH, Memberikan pengarahan atau berdiskusi dalam kelompok KPM PKH, Memberikan pendampingan rutin, Berkunjung ke rumah KPM PKH, Meningkatkan kapasitas diri.

Memfasilitasi proses pengaduan serta melakukan konsolidasi Pencapaian tujuan menjadikan pendamping untuk lebih giat menghimbau masyarakat agar memeriksa kesehatan anak-anaknya keposyandu setempat agar mendapatkan obat-obat gratis dan dana bantuan PKH tersebut nantinya dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya seperti bisa membeli makan pokok, kebutuhan anak-anak sekolah dan membeli obat saat keadaan lagi sakit, sehingga sedikit demi sedikit para penerima PKH akan merasa semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan adanya bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Toto Budiarto, selaku pendamping PKH Desa Adiluwih. “Selama saya menjadi pendamping PKH, masyarakat Desa Adiluwih sebagai keluarga penerima manfaat PKH banyak menerangkan kalau mereka sudah sejahtera. Biasanya saya menghubungi ketua kelompok untuk menanyakan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Adiluwih serta sebagian penerima PKH sudah memahami terhadap besar kecilnya dana yang akan mereka terima, karena dana itu tidak bisa diubah-ubah penerimanya itu langsung dari pusat yang mengaturnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pendamping PKH Desa Adiluwih sudah melakukan hubungan yang baik antar sesama keluarga penerima bantuan PKH, beserta selalu melakukan komunikasi

yang baik dengan ketua kelompok KPM, dan selalu berkoordinasi terhadap segala pengaduan masyarakat jika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nurlaila, selaku ketua kelompok PKH Desa Adiluwih. “Pendamping PKH mempercayai saya sebagai ketua kelompok untuk ibu-ibu penerima PKH. Selama saya menjadi ketua kelompok, saya selalu menanyakan perihal kesejahteraan terhadap ibu-ibu penerima PKH, dan sejauh ini masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, Alhamdulillah lebih sejahtera dari sebelumnya”.

Hal ini juga dipertegas oleh ibu siti, selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Adiluwih “Alhamdulillah selama menjadi peserta penerima bantuan PKH, kehidupan perekonomian keluarga saya menjadi lebih baik dari pada sebelumnya”.

Berdasarkan wawancara diatas, sebelum adanya PKH masyarakat Desa Adiluwih masih bisa di golongkan ke dalam kategori masyarakat yang kurang sejahtera, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Namun, Program Keluarga Harapan yang sedang berlangsung sampai saat ini telah memberikan perubahan bagi masyarakat selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH dan telah menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan aturan atau komponen yang sudah ditetapkan atau diterima misalnya digunakan untuk buka usaha warung kopi sehingga pendamping program keluarga harapan terus menerus memberikan kepercayaan kepada keluarga penerima agar selalu menggunakan kejalan yang benar dan bermanfaat dan pendamping PKH juga sangat yakin kalau masyarakat di Desa Adiluwih tercatat sebagai masyarakat yang sejahtera.

3.1.5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dalam kegiatan maupun program, yang dilihat dari sejauh mana dapat memberikan dampak serta efek yang sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan nyata juga menentukan efektif atau tidaknya kegiatan maupun program yang akan dijalankan, jika programnya berjalan dengan baik dan sesuai maka hal tersebut dapat memperoleh hasil yang nyata pula bagi para kelompok sasaran dalam setiap kegiatan ataupun program.

Perihal ini perubahan nyata harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping agar mencapai suatu tujuan yang dapat dirasakan oleh setiap masyarakat penerima PKH, tujuan yang

dimaksud adalah Program Keluarga Harapan dapat memberikan sebuah bantuan bersyarat dengan jaminan sosial berupa masyarakat dapat mengakses jaminan kesehatan diperuntukkan bagi ibu hamil dan kesehatan bayi/balita serta jaminan pendidikan dasar bagi keluarga yang tergolong miskin.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Toto Budiarto, selaku pendamping PKH Desa Adiluwih “Perubahan nyata selama saya menjadi pendamping PKH, dapat dilihat dari segi pendidikan anak-anak tidak putus sekolah, dari segi kesehatan tidak ada lagi ibu-ibu hamil dan bayi/balita yang kekurangan gizi karena kegiatan posyandu diadakan setiap bulannya, serta dari segi ekonomi masyarakat sudah membuka usaha kecil-kecilan untuk membiayai kehidupan anak-anak mereka kedepan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping PKH Desa Adiluwih sudah menjalankan tugasnya sebagai pendamping yang selalu memberikan arahan kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH mengenai hak dan juga kewajiban yang harus dijalankan, agar tujuan dari PKH tercapai yaitu untuk mensejahterakan keluarga miskin. Serta dalam penyelesaian setiap masalah-masalah yang terjadi terhadap peserta bantuan PKH, maka pendamping akan membicarakan langsung kepada pihak yang bermasalah tersebut, seperti jika ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kesehatannya ke posyandu, yang mana hal tersebut harus dijalankan sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta PKH, maka pendamping akan mempertanyakan langsung keseriusan peserta tersebut dalam menjalankan kewajibannya sebagai peserta PKH, serta diberikan kesempatan sebanyak tiga kali agar tidak mengulang permasalahan tersebut.

Kemudian Ibu Nurlaila, selaku ketua kelompok PKH juga menjelaskan “Keluarga penerima PKH, baik itu terdapat ibu hamil dan bayi/balita, anak sekolah sudah lebih meningkat serta terlihat anak-anak Desa Adiluwih dapat menyelesaikan sekolahnya dengan semestinya”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Yuni, selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Adiluwih. “Selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH, saya sangat merasa terbantu dengan adanya PKH. Karena, anak-anak dapat bersekolah dengan layak serta terjamin pendidikannya”.

Sebagaimana wawancara diatas, data telah menunjukkan bahwa keluarga penerima PKH merasa terbantu meringankan beban pengeluaran kebutuhan

sehari-hari. Karena, bantuan Program Keluarga Harapan dikeluarkan secara tunai empat kali dalam setahun, dimana bantuan PKH tersebut dapat berbentuk layanan seperti pendidikan dan kesehatan serta bantuan langsung tunai berupa uang dan juga sembako yang diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

3.2. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendampingan KPM PKH

Faktor pendukung dan hambatan dapat di lihat dari ruang lingkup internal ataupun eksternal pada pelaksanaan program. Adapun pada faktor pendukung internal pada pelaksanaan pendampingan adalah cara pendamping dalam hal berkomunikasi yang baik, yang akan memudahkan Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam memahami serta menjalankan kewajibannya. Sedangkan faktor pendukung eksternal adalah adanya partisipasi dari setiap masyarakat sebagai anggota penerima bantuan PKH dalam memberikan informasi apa saja masalah yang dihadapi kepada pendamping PKH, yang kemudian akan di carikan solusinya.

Faktor penghambat pada pelaksanaan pendampingan PKH juga dapat di lihat melalui ruang lingkup internal dan eksternal, diantaranya pada faktor internal adalah pendamping tidak diberikan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pada faktor eksternal adalah masih ditemukan masyarakat yang tidak berhadir pada setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping. Berdasarkan uraian di atas, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pendampingan PKH di Desa Adiluwih.

3.3. Faktor Pendukung dalam pendampingan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Adapun faktor pendukung terhadap efektifitas pendamping sosial PKH dalam rangka pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut : Pendamping Telah diberikan Diklat, Diklat P2K2/FDS PKH merupakan diklat yang ditujukan kepada pendamping PKH untuk meningkatkan skill dan tehnik pendamping dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator materi pada kegiatan P2K2/FDS. Diklat P2K2/FDS berlangsung selama 10 hari dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 80 jamlat. Dalam diklat tersebut, peserta diajarkan berbagai teknik dalam memfasilitasi atau menyampaikan materi kepada audience melalui Materi Teknik Fasilitasi. Selain teknik fasilitasi,

materi penting lainnya yang disampaikan dalam diklat ini antara lain materi Pendidikan dan Pengasuhan anak, materi Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha, materi Kesehatan dan Gizi, materi Perlindungan Anak, dan materi Kesejahteraan Sosial (Disabilitas dan Lanjut Usia). Dari 80 jamlat, 50 jamlat diantaranya merupakan kegiatan Praktek Belajar Lapangan (PBL). Dalam kegiatan PBL, peserta diklat akan praktek simulasi menyampaikan materi (fasilitator) secara langsung kepada KPM PKH. Sehingga diharapkan, peserta akan terbiasa dan tidak canggung lagi dalam menyampaikan materi pada saat kegiatan P2K2/FDS di wilayah dampungannya masing-masing. Pendamping telah Bersertifikasi PEKSOS, Yang dimaksud sertifikat kompetensi dalam Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Adiluwih mempunyai beberapa faktor yang dapat mendukung proses keberhasilan program. Pelaksanaan pendampingan akan menghadapi sebuah proses yang dinamakan faktor hambatan dan pendukung, dimana dengan adanya faktor hambatan dan pendukung tersebut sebuah program akan mampu menjadi lebih baik dengan cara mengevaluasi diri dan memperbaiki diri.

Pendukung merupakan unsur penting dalam peran untuk mewujudkan suatu keberhasilan dalam sebuah program maupun kegiatan yang dilakukan. Dasar dari proses pelaksanaan pendukung sebuah program dapat dilihat dari bagaimana seseorang atau pemimpin dalam menjalankan peran maupun tugasnya dalam memberikan pengetahuan serta perhatiannya kepada masyarakat yang di pimpin atau yang didampinginya, yang mana hal ini merupakan suatu faktor pendukung yang dapat menentukan penentu keberhasilan pada program yang dijalankan.

Pendamping PKH pada saat menjalankan tugasnya pastinya ada hal-hal yang dapat mendukung dalam setiap proses kegiatannya. Faktor pendukung biasanya meliputi ketersediaan dalam memfasilitasi setiap perilaku atau keterampilan individu maupun kelompok.

Bapak Toto Budiarto, selaku pendamping PKH Desa Adiluwih menjelaskan. “Menjadi pendamping PKH saya memiliki keterampilan yang baik dengan

anggota kelompok KPM PKH Desa Adiluwih. Sehingga saya dapat dengan mudah membentuk dan membina hubungan yang positif dengan kelompok sasaran, saya memiliki rasa tanggungjawab dan empati yang besar terhadap kelompok binaan saya”Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping PKH Desa Adiluwih memiliki keterampilan komunikasi yang baik dengan masyarakat yang termasuk kedalam Keluarga Penerima Manfaat dari PKH. Pendamping yang berkualitas tentunya akan dapat menentukan keberhasilan dari suatu program yang dijalankan.

3.4. Faktor Penghambat dalam Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Penghambat adalah suatu keadaan maupun penyebab lainnya yang menghambat atau menghalangi kemajuan pencapaian suatu hal. Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya tentu ada hambatan yang dirasakan seperti, anggota ibu-ibu penerima PKH yang sulit menerima penjelasan dan membutuhkan waktu lama untuk memahami program yang disampaikan oleh pendamping PKH, sehingga muncul pemikiran berbeda-beda yang membuat tidak efektif dalam setiap kegiatan diskusi yang dilakukan. Sebagaimana penjelasan oleh pendamping PKH yaitu Bapak Toto Budiarto. “Hambatan yang saya rasakan adalah kurang efektif dalam membagi waktu untuk setiap Desa yang saya dampingi, karena saya harus memahami kondisi masyarakat di setiap Desa dalam proses menjalankan kegiatan-kegiatan pada program PKH sampai saat ini. Kemudian hambatan lainnya seperti ibu-ibu penerima PKH yang jarang datang, sehingga tidak memahami program PKH yang disampaikan di setiap pertemuan, ada saja alasan yang membuat mereka tidak hadir dan pada akhirnya setiap masalah mereka menanyakan kepada saya, serta masih ada masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya yaitu tidak memeriksakan kesehatan pada layanan kesehatan yang disediakan.” Perihal ini Bapak Toto Budiarto mengatakan bahwa, selaku pendamping PKH banyak sekali hambatan yang terjadi di Desa Adiluwih, mulai dari kehadiran yang tidak efektif pada setiap kegiatan dilakukan, kewajiban sebagai penerima PKH tidak dijalankan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, mengamati dan melihat masalah serta melakukan

wawancara secara mendalam tentang efektivitas pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Efektifitas Pemberdayaan pendampingan PKH di Desa Adiluwih sudah efektif, proses pendampingan telah mencakup sebagian besar ruang lingkup pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya; kesejahteraan anak dan keluarga, kesejahteraan remaja dan generasi muda, Kesejahteraan orang lanjut usia, pelayanan kesejahteraan sosial umum pelayanan sosial koreksional, pelayanan sosial medis, pelayanan sosial bagi penyandang cacat, pelayanan sosial perumahan dan lingkungan. Dalam hal pemahaman program, pendamping memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal pemberian materi/pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan PKH itu sesungguhnya, dan masyarakat menerima dengan baik, dalam hal ketepatan sasaran, dimana sudah berjalan dengan efektif. Masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya menerima bantuan PKH, sedangkan masyarakat yang dikategorikan mampu, tidak menerima bantuan PKH atau dengan kata lain untuk penerimaan bantuan PKH di Desa Adiluwih sudah tepat sasaran. Dalam hal ketepatan waktu, dimana pendamping sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi dengan para KPM. Dalam hal pencapaian tujuan, dimana pendamping telah memenuhi perannya untuk membantu masyarakat selaku penerima bantuan PKH dalam meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terbantunya perekonomian masyarakat, dengan memanfaatkan bantuan tersebut ke hal-hal yang bermanfaat seperti masyarakat dapat membuka usaha-usaha lain untuk perekonomian sehari-hari. Dalam hal perubahan nyata, ditunjukkan dengan kehidupan perekonomian masyarakat yang jauh lebih sejahtera dari sebelum adanya bantuan PKH, yang mana hal tersebut tidak lepas dari peran serta tugas dari pendamping yang senantiasa membantu masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Adapun upaya pendamping yang

dilakukan dalam pemberdayaan penerima program PKH telah dilaksanakan secara baik hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya program Bimbel bagi anak KPM PKH, Program Pemanfaatan Lahan yang terbatas, Program Simpan Pinjam Anggota kelompok PKH, dan adanya penerapan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai upaya pemberdayaan perubahan Perilaku KPM.

b. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yaitu, pendamping telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan Program PKH dan pendamping telah tersertifikasi dalam pelaksanaan sebagai Pekerja Sosial, hal ini yang menjadi dasar pendamping memiliki keterampilan yang baik dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat sebagai penerima bantuan PKH, sehingga memudahkan pendamping dalam memberikan pemahaman serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat selama proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan Desa Adiluwih yaitu, Pendamping PKH kesulitan untuk membagi waktunya dalam setiap mengadakan kegiatan program pemberdayaan yang dilakukan dikarenakan terlalu luasnya wilayah dampingan yang di emban, selain itu masih ditemukan masyarakat yang tidak hadir pada saat diadakannya pertemuan kegiatan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., dkk. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Departemen Sosial.
- (2009). *Bimbingan Teknis PKH*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Damanik, J. (2015). *Pekerjaan sosial*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya: Gitamedia Press, cet 1
- Departemen Sosial. (2017). *Bimbingan teknis PKH*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.

- Departemen Sosial. (2020). Bimbingan teknis PKH. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Helaluddin, dkk. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Habibullah. (2011). *Peran pendamping pada program keluarga harapan kabupaten karawang*. Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial), 16(2), 101–116
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*, SAGE Publications Ltd.
- Munandar, H., H. M. Z. Arifin., & Zulfiani, D. (2019). *Peranan Tenaga Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara*, eJournal Administrasi Negara, 7 (4), 9452-9465 ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
- Nurhasanah, S., & Kamil, M. (2019). *Asep Saepudin, Pelatihan Pendamping Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Fasilitasi Program Keluarga Harapan*, PEDAGOGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan, 205-217.
- Nandini. R. dkk, (2019). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang*, jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 4 Nomor 1, 74-82.
- Rahayu, S. L. (2015). *Bantuan sosial di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Volume 1 (2): 161-169.
- Rauf A. H. (2018). *Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal INOVASI, Volume 7, Nomor 4.
- Rosmedi., & Risyanti, R. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Safei, A. A., & Machendrawati, N. (2023). *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Sospol, Vol 2 No.1.
- Yuliani, K. F. (2017). *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) Di Kota Bandar Lampung*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.